



**PIDATO KENEGARAAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SERTA  
KETERANGAN PEMERINTAH  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2008  
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
16 AGUSTUS 2007**

DICETAK OLEH:  
PERUM PERCETAKAN NEGARARI

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**RALAT PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI  
TANGGAL 16 AGUSTUS 2007**

NO.	HALAMAN	TERTULIS	SEHARUSNYA
1	5 pengantar	Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati, Saudara Ketua...	Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang saya hormati, Saudara Ketua...
2	10 Baris ke 15 dari atas	dalam mana	di mana
3	15 Baris ke enam dari atas	Sebagai anggota tidak tetap keamanan PBB,	Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,
4	20 Baris ke delapan dari bawah	... ekonomi tahun 2008 yang terus membaik hingga diperkirakan dapat mencapai 6,8 persen. Stabilitas tetap terjaga yang ditunjukkan oleh tingkat ...	... ekonomi tahun 2008 yang diharapkan terus membaik dan diperkirakan dapat mencapai 6,8 persen. Stabilitas diharapkan tetap terjaga, dengan tingkat ...
5	23 Baris ke 19 dari atas	Penyaluran BOS pada tahun 2007 cakupannya mencapai 41,9 juta siswa.	Penyaluran BOS pada tahun 2008 cakupannya diharapkan mencapai 41,8 juta siswa.
6	30 Baris ke 13 dari atas	Sebagai kepala negara, saya mengajak, Dewan Perwakilan Rakyat, ...	Sebagai kepala negara, saya mengajak Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,  
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,  
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,  
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,  
Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, untuk

mengawali Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2007/2008. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RAPBN Tahun 2008, beserta Nota Keuangannya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,  
Hadirin yang saya muliakan,

Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya, pada hari ini dapat kembali menyampaikan Pidato Kenegaraan, untuk menyampaikan pesan-pesan saya kepada seluruh rakyat di penjuru tanah air. Insya Allah, besok kita akan memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita yang ke-62. Pada saat-saat yang bersejarah ini, patutlah kita melakukan refleksi, seraya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada segenap pejuang bangsa, yang berjuang demi tegaknya negeri kita. Perjuangan yang dilalui dengan tetesan darah dan air mata, serta diplomasi yang tiada henti.

Di hari yang membahagiakan ini, sekali lagi, saya ingin menyampaikan ungkapan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para perintis dan pejuang, serta Proklamator Kemerdekaan bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta, yang telah mengantarkan bangsa kita ke alam kemerdekaan. Rasa hormat dan penghargaan yang tinggi, saya sampaikan pula kepada para Presiden pendahulu saya yakni Dr. Ir. Soekarno, Jenderal Besar Soeharto, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, dan Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan pemikiran, sumbangsih, dan darma baktinya hingga negara kita mengalami kemajuan seperti sekarang ini. Saya yakin dan percaya, para pendahulu kita telah berbuat yang terbaik, dengan segala tantangan dan persoalan yang dihadapinya. Mari kita hormati jasa-jasa dan pengabdianya, pada tempat yang paling terhormat.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, untuk memaknai kemerdekaan dengan bersama-sama membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Mari kita tumbuhkan kembali ikatan kebangsaan, dari segenap anak bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan kebudayaan. Mari kita kukuhkan kembali kebersamaan dalam bingkai; *Bhinneka Tunggal Ika*.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,  
Hadirin yang saya muliakan,

Tidak dapat dipungkiri, dalam perjalanan sejarah bangsa, kita telah mengalami berbagai cobaan dan ujian. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kita harus menghadapi perjuangan bersenjata melawan tentara kolonial yang ingin kembali menjajah bangsa kita. Kita pun harus menghadapi bangsa kita sendiri, yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima puluh tahun yang lalu, ketika usia negara kita baru menginjak dua belas tahun, pada tanggal 17 Agustus 1957, Presiden Soekarno berkata; *"...Hati kita kadang-kadang berdebar-debar. Akan tenggelamkah kita sebagai akibat tahun 1957 ini? Atau akan tetap tegakkah kita sebagai negara?"* Hal itu diucapkan beliau, mengingat situasi politik dan keamanan negara kita waktu itu menghadapi tantangan yang berat. Bahkan di bagian lain dari pidato itu, Bung Karno juga mengatakan, bahwa sebagian kalangan dunia meramalkan, Indonesia mulai runtuh (*Indonesia is breaking up*), dan juga dikatakan sebagai satu bangsa yang sedang ambruk (*a nation in collapse*).

Sepuluh tahun yang lalu, awal dari krisis dahsyat yang menimpa diri kita, kecemasan, kegamangan, dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul kembali. Kita mengalami tantangan yang berat. Rakyat kita seakan-akan kehilangan pegangan, dan kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Kerusuhan, kekerasan, dan permusuhan, hampir mewarnai keseharian kita. Apalagi, situasi dunia juga penuh gejolak dan ketidakpastian.

Hantaman terhadap ekonomi kita, sungguh amat berat. Ketika itu, ada kecemasan besar, disertai kegamangan, disorientasi, dan pesimisme rakyat kita. Bahkan sebagian kalangan dunia meramalkan Indonesia akan mengalami disintegrasi bangsa, dan kemudian runtuh.

*Alhamdulillah*, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, berkat perjuangan, ketabahan, dan keuletan kita sebagai bangsa, kita dapat melalui berbagai gejolak dan badai krisis itu dengan baik. Hari ini, kita bersama-sama menyaksikan negara kita, Indonesia, masih tetap tegak berdiri; dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita telah membuktikan bahwa kecemasan bangsa kita pada tahun 1957, tidak terbukti. Lima puluh tahun kemudian, Indonesia masih tegak berdiri sebagai sebuah bangsa. Krisis besar yang terjadi sejak 10 tahun yang lalu, juga dapat kita lampau dengan selamat. Marilah kita buktikan, sepuluh tahun; lima puluh tahun dari sekarang ini, bahkan sampai kapan pun, insya Allah, Negara kita bukan hanya tetap tegak berdiri, tetapi juga akan semakin maju dan sejahtera.

Saudara-saudara se-Bangsa dan Se-tanah air.

Hadirin yang saya muliakan,

Saya ingin menyegarkan ingatan kita akan kerangka dasar dalam kehidupan bernegara. Ada empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia tercinta, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa kita, selalu ada saja ujian terhadap pilar-pilar utama kehidupan bernegara. Dalam era globalisasi dan era transformasi nasional dewasa ini, kembali kita menghadapi tantangan terhadap empat pilar utama itu. Terhadap rongrongan itu, pertama-tama kita harus menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, sudah final.

Pancasila adalah ideologi nasional bangsa kita, dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa;

*welthanchaung*, pandangan hidup bangsa (*way of life*), serta perekat dan pemersatu bangsa kita. Kita masih ingat, pada tahun 1998 di awal reformasi, awal perubahan besar negeri kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika itu, telah mengeluarkan TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sekaligus, secara eksplisit, menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, marilah kita hidupan, kita amalkan, dan kita pegang teguh Pancasila sebagai dasar negara kita.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat cita-cita, tujuan nasional, dan dasar negara, juga harus kita pertahankan. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga sudah final, dan tidak dapat digantikan dengan bentuk negara yang lain. Di tengah-tengah keragaman bangsa kita yang majemuk, seloka *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus kita aktualisasikan, sebagai keniscayaan kehidupan bangsa yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita harus tetap bersatu, bertekad bulat, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Memang, kita tidak ingin Pancasila dan UUD 1945 kita sakralkan, karena memang keduanya tidak perlu disakralkan. Namun, pemikiran untuk mengganti Pancasila dengan ideologi dan dasar negara lain, ataupun untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 yang merupakan ruh dan jiwa dari konstitusi kita, tentulah tidak akan kita berikan tempat dalam kehidupan bernegara kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam kurun waktu 62 tahun, kita juga mengalami masa pasang surut dari kehidupan politik dan demokrasi. Kita pernah mengalami dan menjalankan demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi yang dibangun

oleh sistem otoritarian. Ternyata semuanya itu, memunculkan persoalan-persoalannya sendiri. Dalam era reformasi sekarang ini, demokrasi makin mekar. Kebebasan tumbuh, dan hak-hak asasi manusia mendapatkan penghormatan yang tinggi. Tantangan baru yang kita hadapi adalah, bagaimana kita semua menggunakan kebebasan ini secara tepat, penuh manfaat, penuh tanggung jawab dan disertai akhlaq yang baik. Kita tentu tidak ingin menggunakan kebebasan yang tanpa batas, karena akan mengganggu tatanan kehidupan yang tenteram dan harmonis. Marilah kita abdikan demokrasi dan kebebasan ini untuk menjawab kepentingan rakyat, untuk mengatasi permasalahan rakyat, dan untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Ke depan, kita harus terus menerus membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis dan seimbang, dalam mana demokrasi dan kebebasan makin hidup, disertai kepatuhan kepada pranata hukum (*rule of law*), toleransi, serta etika dan aturan main yang kita sepakati bersama. Dengan demikian, kita akan benar-benar menuju kehidupan demokrasi yang mapan, yang memberikan ruang bertemunya berbagai elemen demokrasi secara harmonis. Kita berikan ruang bagi kebebasan, disertai tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan itu secara konstruktif. Kita berikan ruang bagi kebebasan berbicara disertai tanggung jawab untuk menggunakan etiket dalam berbicara; kebebasan pers disertai tanggung jawab untuk menyiarkan berita yang akurat dan obyektif; serta kebebasan berkumpul dan berunjuk rasa disertai tanggung jawab untuk melaksanakannya secara tertib.

Kedaulatan dan keutuhan negara merupakan kepentingan nasional yang tidak dapat dikompromikan. Upaya untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara, kita laksanakan dengan berbagai cara. Mulai dari pendekatan yang paling lunak hingga yang paling keras. Pengalaman sejarah kita di dalam menangani permasalahan ancaman kedaulatan di dalam negeri, berbagai ragam cara dan pendekatan kita lakukan. Dalam era demokrasi dan reformasi sekarang ini, sejauh mungkin kita menggunakan cara-cara yang

damai dan persuasif, dengan mengedepankan pendekatan keadilan dan kesejahteraan. Aspirasi daerah untuk mendapatkan keadilan, pemerataan pembangunan, serta wewenang yang lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri, kita tanggapi secara positif dengan menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk otonomi yang luas untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh. Namun, sekali lagi, negara akan tetap tegas, bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan gerakan separatisme yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara.

Kita juga harus tegar dan lentur menghadapi arus sejarah baru yang sangat dahsyat dan tidak dapat kita hindari: yakni globalisasi, dengan segala dampak positif dan negatifnya. Bangsa kita tidak boleh terlindas oleh gelombang sejarah ini. Sebaliknya, bangsa kita harus dapat memanfaatkan dan meraih berbagai peluang yang timbul dari globalisasi. Untuk itu, kita harus menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang berdaya-saing tinggi, bangsa yang inovatif dan kreatif. Bangsa kita juga harus kembali berada di garis terdepan dalam upaya membangun kemitraan global (*global partnership*). Kemitraan global ini mutlak diperlukan, agar umat manusia dapat keluar dari berbagai tantangan yang silih berganti: kesenjangan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, konflik, bencana alam, penyakit menular, terorisme, perubahan iklim, dan lain sebagainya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Hadirin yang saya muliakan.

Pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2004 telah berlangsung hampir tiga tahun. Sejak awal, saya telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009. Dalam RPJM Nasional, tercantum tiga agenda pembangunan nasional kita, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kurun tiga tahun terakhir, kondisi yang kita hadapi memang penuh tantangan. Berbagai bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana banjir telah menyebabkan jatuhnya korban dan kerusakan material. Melonjaknya harga minyak dunia juga menyebabkan dampak yang cukup berat bagi perekonomian. Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya baik melalui bantuan tanggap darurat, maupun rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak. Tentu saja dalam pelaksanaannya ada hasil yang menggembirakan, namun masih ada pula hal-hal yang masih memprihatinkan dan harus kita perbaiki.

Sebagai contoh dalam penanganan lumpur di Sidoarjo, sejak awal telah kita upayakan. Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah telah membentuk Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP2LS). Kita tidak dapat membiarkan rakyat terus menderita. Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan. Pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini. Laporan terakhir yang saya terima, proses penyelesaian jual beli lahan dan bangunan sebesar 20% untuk tahap awal, telah berjalan. Pemerintah akan memastikan pembayaran sisanya akan dilakukan sesuai ketetapan yang disepakati dalam Perpres 14 Tahun 2007. Disamping itu pemerintah juga terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk mengatasi semburan lumpur agar tidak terus meluas.

Keamanan dalam negeri, termasuk keamanan dan ketertiban umum berkembang semakin baik. Keadaan di Poso dan Maluku juga dapat kita kelola, dengan kohesi sosial yang makin kokoh. Reintegrasi pasca konflik yang kita laksanakan di Aceh juga berlangsung secara damai dan berkelanjutan. Adalah wajar apabila masih dijumpai ketegangan dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang dulunya bersengketa lebih dari 30 tahun, karena memang upaya untuk membangun rasa saling percaya (*Trust Building*) sedang terus kita laksanakan. Semua pihak, terutama pemerintahan di Aceh sendiri harus terus mengawal, mengamankan dan menyukseskan proses reintegrasi ini, seiring dengan upaya membangun kembali

Aceh pasca tsunami, menuju ke kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Demikian pula di tanah Papua, kita terus melakukan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat. Menandai keseriusan Pemerintah untuk segera dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi tersebut, saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Prioritas pembangunan ini terutama ditujukan pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah potensial, serta kebijakan khusus bagi putra-putri Papua.

Saya mendorong jajaran Pemerintah Daerah, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan aturan Otonomi Khusus, untuk berdiri di depan dalam menyukseskan upaya percepatan pembangunan ini. Pemerintah Pusat tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk terus mendukung dan membantu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Inilah komitmen dan langkah kita untuk membangun Papua dan Papua Barat. Saya tegaskan bahwa Pemerintah tidak akan memberi tempat bagi siapapun, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berniat melaksanakan aksi untuk menggagalkan percepatan pembangunan di tanah Papua, dan sekaligus mengancam kedaulatan dan keutuhan negara kita.

Aksi-aksi terorisme yang beberapa tahun lalu sangat menggelisahkan masyarakat, telah dapat kita atasi. Kita telah semakin berhasil mencegah dan menanggulangi aksi-aksi teror di negara kita. Kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan dan aparat penegak hukum juga semakin tinggi. Kita patut memberikan penghargaan kepada jajaran Polri dan pihak-pihak lain yang telah berhasil menanggulangi ancaman terorisme ini. Sebagaimana sering saya sampaikan, kedepan, kita tidak boleh hanya menangani terorisme yang berada di permukaan, tetapi harus kita sentuh dan atasi akar penyebabnya, seperti keterbelakangan, kemiskinan, ketidak

adilan, ekstrimitas, radikalitas dan budaya kekerasan. Kita sungguh serius untuk mencegah dan menanggulangi terorisme ini, karena kita ingin menyelamatkan masyarakat dan bangsa kita, menghadirkan keamanan dan ketentraman di negeri kita, dan sekaligus sebagai tanggung jawab dan kebersamaan kita dengan masyarakat global untuk menciptakan dunia yang aman dan damai.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Hadirin yang saya muliakan.

Keberhasilan sebuah pembangunan juga sangat ditentukan oleh kualitas tata pemerintahan serta efektifitas dan kinerja birokrasinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan menciptakan tata kelola yang bersih dan baik (*good and clean governance*) pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Reformasi birokrasi, mencakup perbaikan yang seimbang antara sistem kerja, pengukuran kinerja, dan penerapan disiplin dan remunerasi. Beberapa langkah awal reformasi birokrasi ini telah dimulai oleh Departemen Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam penerapan politik luar negeri, kita terus membangun kemitraan melalui diplomasi total. Tahun-tahun terakhir ini kita telah mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan banyak negara, dengan tujuan untuk menunjang terpenuhinya kepentingan nasional kita. Dengan kerangka kemitraan strategis ataupun kemitraan komprehensif, kita telah meningkatkan kerjasama dan kemitraan kita dengan banyak negara, antara lain Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Australia, Rusia, Jepang dan India. Hasil nyata dari pengembangan kemitraan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama di bidang perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hukum, penanganan bencana, penanggulangan flu burung, teknologi informasi, industri pertahanan, kehutanan dan lain lain.

Dalam ikut mendukung upaya perdamaian dan mencari solusi konflik di Timur Tengah kita aktif menjalankan berbagai langkah

diplomasi untuk benar-benar dapat mengatasi masalah di Timur tengah, utamanya di Palestina, Lebanon dan Irak secara damai, adil dan permanen. Disamping mengirimkan kontingen Garuda 23 A untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, kita juga memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Lebanon. Sebagai anggota tidak tetap keamanan PBB, Indonesia akan tetap memainkan peran yang konstruktif, berdasarkan politik bebas dan aktif yang kita anut, agar perdamaian dan keamanan dunia semakin dapat ditegakkan. Pada prinsipnya Indonesia berpendapat dan menyerukan untuk digunakannya cara-cara damai, dan bukan militer, dalam penyelesaian berbagai isu dan konflik global, termasuk isu nuklir Iran, nuklir Korea Utara dan isu-isu kritical lainnya.

Terkait dengan isu-isu global, Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah lingkungan hidup terutama pergantian iklim yang menyebabkan pemanasan bumi. Pemanasan global adalah masalah kita bersama. Pada tanggal 3-14 Desember 2007 yang akan datang, insya Allah, kita dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang akan diikuti oleh 180 negara. Sebagai tuan rumah, kita ingin menunjukkan pada dunia internasional, bahwa Pemerintah Indonesia memiliki perhatian dan gagasan untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari pengaruh perubahan iklim global. Kita juga menginginkan lahirnya gagasan baru, pasca *Kyoto Protocol*, yang lebih adil dan diterima semua pihak.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menata perekonomian kita, dituangkan dalam strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan atau *growth with equity*. Strategi ini merupakan pilihan yang paling tepat, karena pertumbuhan saja tidak menjamin

pemerataan. Pertumbuhan yang kita capai haruslah memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Berbagai hal telah kita capai dalam satu dasa warsa ini, terutama dalam penyehatan sendi-sendi perekonomian semenjak krisis ekonomi. Stabilitas ekonomi terus terjaga. Pada akhir bulan Juni 2007, cadangan devisa kita mencapai USD 50,9 miliar, bertambah USD 8,3 miliar dibandingkan akhir tahun 2006. Nilai tukar terjaga stabilitasnya pada kisaran yang kondusif bagi pelaku ekonomi. Sektor perbankan memiliki neraca keuangan yang sehat dan semakin pulih dalam fungsi perantara untuk menunjang kebangkitan ekonomi. Sektor riil juga sudah menunjukkan momentum bangkit kembali. Selain sektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 11,6 persen, pada semester I tahun 2007 sektor bangunan juga menunjukkan pertumbuhan yang semakin kuat, sebesar 8,6 persen, dan bahkan sektor industri pengolahan mulai menunjukkan kebangkitan dengan pertumbuhan 5,4 persen. APBN juga semakin membaik dengan ratio utang yang semakin turun dari 47 persen pada tahun 2005, menjadi sekitar 35,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2007.

Memang permasalahan belum seluruhnya teratasi dan tantangan masih akan terus menghadang kita. Pengangguran dan kemiskinan masih belum sepenuhnya kita tanggulangi. Berbagai sarana kesehatan dan pendidikan masih terus perlu dibangun. Kondisi infrastruktur jalan raya, pelabuhan udara dan laut, listrik, serta irigasi mengalami kerusakan dan kurang mendapat perhatian semenjak krisis. Hal ini menyebabkan beban biaya yang tinggi bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.

Untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut dan dalam rangka menghadapi tantangan yang tidak mudah pemerintah senantiasa berusaha melaksanakan tiga agenda pembangunan yang terdapat dalam RPJM secara seimbang. Upaya tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Tema

pembangunan dalam RKP Tahun 2008 adalah "Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran". Sesuai tema tersebut, dalam RKP tahun 2008 ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional. Kedelapan prioritas pembangunan tersebut adalah: (1) peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja; (2) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan; (3) percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi; (4) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (5) peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; (6) pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; (7) penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri; dan (8) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulangan flu burung.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Kita sepakat bahwa kesejahteraan rakyat merupakan muara dari semua agenda pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah terus melakukan program-program pro-rakyat. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri, secara bertahap, kita naikkan penghasilannya. Bagi masyarakat, kita upayakan memperingan pengeluarannya. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, pemerintah terus meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Kita ingin, pendidikan yang bermutu dapat dinikmati oleh seluruh anak-anak kita. Pemerintah telah menetapkan bidang pendidikan sebagai agenda sangat penting dalam pembangunan nasional, dan sekaligus juga mendapatkan alokasi anggaran tertinggi.

Sementara itu, untuk program-program yang sudah berjalan, seperti Bantuan Operasional Sekolah dan pemberian beasiswa bagi siswa miskin di berbagai jenjang pendidikan, tetap dilanjutkan. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai jenjang, terus kita lakukan. Adapun untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar, sudah sepenuhnya diserahkan kepada